

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH

STUDI KASUS PELAKSANAAN PROGRAM KKN DAN P2M DI DESA RIDOMANAH
KECAMATAN CIBARUSAH KABUPATEN BEKASI

¹M. Harun Alrasyid, ²Ainur Rofieq, ³Rahmat Nuryono

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi, Jl. Cut Meutia no. 83 Bekasi
17113

e-mail: ¹maharuna13@gmail.com, ²a_rofieq@yahoo.com, ³rahmatnuryono@yahoo.com

Abstrak. Air menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan manusia serta menjadi faktor fundamental dalam ekonomi. Saat ini suplai terhadap air, terutama air bersih sangat minim. Hal ini ditambah dengan distribusi air yang tidak merata yang berakibat pada munculnya konflik. Menurut United Nations' 2006 World Water Development Report menyatakan bahwa akar dari krisis air dapat ditelusuri dari kemiskinan, ketidaksetaraan, dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Kondisi ini umum terjadi di wilayah perdesaan. Permasalahan yang dihadapi Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi adalah minimnya akses terhadap air bersih. Kondisi wilayah yang berbukit, tidak ada irigasi dan areal persawahan yang hanya mengandalkan pada air hujan, ditambah dengan kondisi sosial masyarakat yang sebagian besar sebagai buruh tani dan berpendidikan rendah membuat mereka tidak mampu lepas dari kondisi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah lembaga pengelola air bersih. Lembaga tersebut nantinya akan mengelola dari proses produksi, distribusi serta keberlanjutannya. Pendekatan yang digunakan adalah berbasis masyarakat dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui program KKN dan P2M serta peran dari aparat pemerintahan desa serta masyarakat desa dibentuk lembaga pengelola air bersih disertai dengan struktur, tugas serta orang-orang yang memegang jabatan tersebut.

Kata kunci: kelembagaan masyarakat desa, program KKN dan P2M, pengelolaan air bersih, Desa Ridomanah Kabupaten Bekasi

1. Pendahuluan

Secara global terdapat 1,1 juta orang yang tidak memiliki akses untuk memperoleh air minum yang sehat, sedangkan sebanyak 2,6 juta orang hidup tanpa ada sanitasi. Di beberapa tempat air limbah pabrik dan kawasan komersial yang tidak tertangani dengan baik masuk ke dalam tanah yang dapat mencemari sumber air di bawah tanah. Terkadang air limbah tersebut mengandung unsur-unsur yang berbahaya yang dapat mengganggu lingkungan. Akibatnya suplai air bersih menjadi terancam. Bahkan sebanyak 5000 orang yang umumnya anak-anak di bawah usia 5 tahun meninggal setiap harinya di seluruh dunia akibat diare dikarenakan meminum air yang sudah terkontaminasi, kebersihan yang tidak layak dan minimnya fasilitas sanitasi. (GTZ, 2007)

Akses pada air bersih dan fasilitas sanitasi merupakan prasyarat dalam pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs). Adanya program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, kerawanan pangan, dan kematian anak, sekaligus juga membawa pengaruh positif pada sisi edukasi, terutama bagi kaum perempuan, dimana terjadi penurunan angka kematian ibu hamil.

Adapun target capaian MDGs mengenai air bersih sebagai berikut: (United Nations Millennium Project Task Force on Water and Sanitation, 2005)

Tabel 1
Target capaian MDGs mengenai air bersih

Capaian MDGs	Capaian ketersediaan air bersih dan sanitasi
1. Mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan	Penyakit yang disebabkan oleh air minum yang tidak bersih dan sanitasi yang tidak layak menambah biaya kesehatan bagi masyarakat miskin. Air merupakan faktor produksi di bidang pertanian, industri, dan aktivitas ekonomi lainnya yang menyediakan kehidupan bagi orang-orang miskin.
2. Pencapaian pendidikan dasar secara menyeluruh	Meningkatkan penyediaan air dan sanitasinya sehingga bisa melepaskan anak-anak perempuan dari kewajiban mencari air sehingga mereka bisa sekolah.
3. Mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Mengurangi batasan waktu, kesehatan, dan merawat agar perempuan lebih produktif.
4. Mengurangi kematian anak	Mengurangi kematian bayi dan anak dengan peningkatan kualitas air.
5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil	Sumber air yang dapat diakses mengurangi tekanan kerja dan masalah kesehatan sehingga mengurangi resiko kematian ibu hamil.
6. Melawan penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya	Air minum yang aman dan sanitasi dasar bisa mencegah penyakit yang disebabkan dari penggunaan air.
7. Menjaga keberlangsungan lingkungan hidup	Penanganan dan pembuangan dari limbah yang layak dapat menjaga sumber-sumber air bersih.

Sebanyak 75 persen penduduk miskin dunia tinggal di daerah perdesaan, sehingga fokus pada kebutuhan air di perdesaan menjadi penting jika dikaitkan dengan capaian MDGs. Kebutuhan air di daerah perdesaan pada umumnya dipergunakan untuk minum dan memasak, kebersihan dan sanitasi. Selain itu, air digunakan untuk mengairi lahan pertanian.

Desa Ridomanah merupakan salah satu desa di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi hasil pemekaran dari Desa Ridogalih. Wilayah Desa Ridomanah terbagi dalam 3 dusun, 6 Rukun Warga (RW), dan 12 Rukun Tetangga (RT), yaitu:

1. Dusun 1, berada di bagian barat Desa Ridomanah, terbagi dalam 2 RW dan 4 RT.
2. Dusun 2, berada di bagian tengah Desa Ridomanah, terbagi dalam 2 RW dan 4 RT.
3. Dusun 3, berada di bagian timur Desa Ridomanah, terbagi dalam 2 RW dan 4 RT.

Lahan pertanian yang ada di Desa Ridomanah merupakan sawah tadah hujan. Saluran irigasi belum ada dikarenakan kontur wilayah yang berbukit-bukit. Selain itu, sumber air sebagai kebutuhan vital masyarakat untuk hidup sangat sulit diperoleh. Akibatnya masyarakat mengambil air dari sungai atau mengandalkan air hujan yang ditampung.

Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam "45" Bekasi tahun 2014 teridentifikasi permasalahan air bersih dan sanitasi yang terjadi di Desa Ridomanah. Selama ini air bersih dikirim setiap minggunya oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan ditampung di bak penampungan yang berada di Kantor Desa. Meski sudah terdapat instalasi pengolah air yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, namun kondisinya tidak dapat digunakan lagi. Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut,

bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kampus sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat?

Target yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah terbentuknya lembaga pengelola air bersih di Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Adapun luaran yang diharapkan adalah adanya lembaga pengelola air bersih di Desa Ridomanah, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

2. Solusi yang Ditawarkan

Konsep Community Development telah banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikannya: *"as the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress"*. (Einsiedel, 1968)

Definisi ini menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional. kebutuhan-kebutuhan baik yang sifatnya untuk kepentingan individu maupun yang sifatnya untuk kepentingan bersama; membuat rencana-rencana tersebut didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, dan bilamana perlu dapat melengkapi dengan bantuan teknis dan material dari pemerintah dan badan-badan nonpemerintah di luar masyarakat.

Arthur Dunham (1978) membedakan "Community Development" dengan "Community Organization". *Community development is concerned with economic life, roads, buildings, and education, as well as health and welfare, in the narrower sense. On the other hand, community welfare organization is concerned with adjustment of social welfare needs and resources in cities, states, and nations as in rural villages*. Jadi community development lebih berkonotasi dengan pembangunan masyarakat desa sedangkan community organization identik dengan pembangunan masyarakat kota.

Lebih lanjut, Dunham (1978) mengemukakan 4 unsur-unsur community development sebagai berikut:

1. a plan program with a focus on the total needs of the village community;
2. technical assistance;
3. integrating various specialities for the help of the community; and
4. a major emphasis upon self-help and participation by the residents of the community.

Salah satu implementasi konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan air bersih dan sanitasi adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Hal tersebut merupakan program Nasional, karena mengingat kinerja sektor air minum dan sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara (WHO-Unicef Joint Monitoring, 2004).

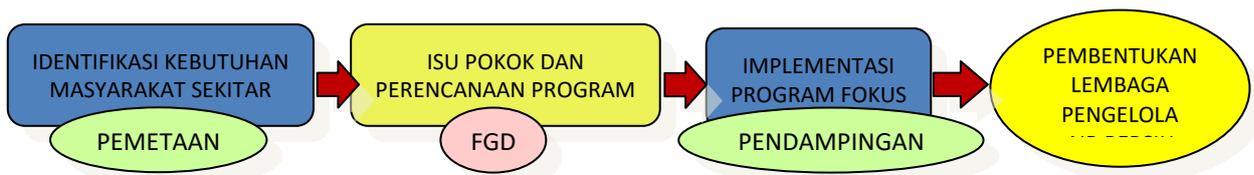
Suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif dan berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat

(perempuan, laki-laki, dan miskin). Program air bersih harus berbasis masyarakat dan partisipatif, artinya seluruh proses perencanaan seperti pemilihan kebutuhan air dan pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif masyarakat, tidak terkecuali kaum perempuan.

Program juga harus dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Ada 5 (lima) aspek keberlanjutan yang harus menjadi perhatian, yaitu: (1) aspek teknis, yaitu sarana dan prasarana; (2) aspek keuangan; (3) aspek lingkungan; (4) aspek kelembagaan; dan (5) aspek sosial.

3. Mekanisme Kerja

Langkah strategis yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah seperti yang tertera dalam gambar berikut.



Gambar 1
Diagram Mekanisme Kerja

3.1 Pemetaan

Pemetaan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan bentuk lembaga yang diharapkan oleh masyarakat, serta aspek pembentukan kelembagaan antara lain:

1. Jenis atau bentuk lembaga
2. Sumber daya manusia
3. Sumber pembiayaan
4. Keberlanjutan program

3.2 Focus Group Discussion

1. Menyampaikan persepsi masyarakat penerima manfaat dalam menyusun program yang dibutuhkan.
2. Membangun komitmen bersama dalam implementasi program di Desa Ridomanah.
3. Menyusun program bersama untuk pembentukan kelembagaan.
4. Melakukan penguatan terhadap program yang akan dilaksanakan.
5. Inisiasi persiapan pembentukan lembaga pengelola air bersih.

3.3 Pendampingan Program

Kegiatan pendampingan diarahkan pada:

1. Memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggotanya, manajemen organisasi, pengakuan dan kewenangan pengelolaan air bersih.
2. Memperkuat kemampuan teknis pengelolaan air bersih.
3. Memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

4. Pelaksanaan Program

Mekanisme pelaksanaan program diawali dengan observasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN UNISMA Bekasi yang menemukan permasalahan dalam hal memperoleh dan mengelola air. Langkah yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan mengumpulkan warga dan dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan aparat Desa Ridomanah. Hasil yang diperoleh adalah adanya kesepakatan untuk meningkatkan sarana fisik, berupa penyediaan pompa air penyedot dan pipa penyalur air. Langkah berikutnya adalah menggerakkan warga untuk bergotong royong membangun instalasi air bersih.

Setelah pembangunan instalasi air bersih serta mahasiswa KKN UNISMA Bekasi berakhir masa pengabdian di Desa Ridomanah, maka pelaksanaan program dilanjutkan oleh tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNISMA Bekasi yang memiliki kompetensi dalam hal pengembangan kelembagaan. Berdasarkan hasil diskusi terarah, salah satu poinnya adalah membentuk lembaga pengelola air bersih.

Pembentukan lembaga pengelola air bersih bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga dalam penyediaan air bersih. Adapun nama lembaga tersebut adalah 'Cipamingkis'. Nama Cipamingkis diberikan didasarkan pada nama sungai yang mengalir di Desa Ridomanah. Struktur organisasi lembaga terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, serta dua anggota, yaitu bidang keuangan dan anggaran, serta bidang meter air disertai dengan tugasnya masing-masing. Lembaga pengelola air bersih ini kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ridomanah Nomor 09/XI/2015 tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Air Minum 'Cipamingkis' tanggal 26 November 2015.

Berkaitan dengan mekanisme pengembangan kelembagaan, hal penting dalam masa pengelolaan dan pengembangan ini adalah adanya masa terminasi, dimana masyarakat yang sebelumnya mendapat bantuan pendampingan dan fasilitasi dari berbagai pihak, baik fasilitator pendamping dalam pengorganisasian masyarakat dan program, maupun fasilitator teknis dari berbagai pelaku yang terkait. Berdasarkan konsep keberlanjutan, pada tahap pengelolaan ini perlu disiapkan mekanisme pelepasan fasilitator pendamping menuju masyarakat yang mandiri. Oleh karena itu, perlu ada tahapan untuk membentuk masyarakat yang siap berperan sendiri dan dapat berperan sebagai salah satu pelaku dalam jaringan pelaku-pelaku yang lain.

Karena program ini merupakan penyelenggaraan yang didasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat, dengan harapan program ini dapat mengembangkan potensi masyarakat yang ada serta menjaga program yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan institusi yang dikembangkan di masyarakat menjadi agenda pokok dalam tahap pengelolaan ini. Beberapa hal penting yang dilakukan untuk kepentingan penguatan institusi ini antara lain:

1. Penguatan jaringan, dimana masyarakat (institusi masyarakat) perlu diberi peluang dan akses lebih banyak kepada pelaku-pelaku lain, supaya dapat

- mengembangkan potensi yang ada dan membuka diri terhadap peluang yang disediakan oleh pelaku-pelaku lain yang terkait dengan kondisi mereka,
2. Peningkatan kapasitas masyarakat berupa penciptaan peluang bagi pendidikan dan pelatihan, baik untuk materi-materi yang menyangkut teknis penyediaan sistem air minum, maupun materi-materi non-teknis, seperti manajemen, keuangan dan administrasi, sistem data-base, dan sebagainya,
 3. Memberikan peluang masyarakat untuk dapat menguasai aset yang ada, tidak saja pada hak pengelolaan, tetapi juga kepemilikan, agar penyelenggaraan pengelolaan air berbasis masyarakat ini dapat menjadi aset yang berkelanjutan dikembangkan oleh masyarakat.

Pasca pembentukan lembaga pengelola, pihak kampus masih tetap melakukan pendampingan untuk memantau berjalannya lembaga. Dalam pendampingan tersebut masih ditemukan sejumlah permasalahan, seperti kerap kali suplai air yang tidak lancar, perluasan wilayah distribusi air, dan beban biaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak kampus sebagai pendamping dan fasilitator menyusun agenda program yang dilakukan melalui rapat koordinasi antara pengelola lembaga dan pemerintah desa. Hasil yang diperoleh berupa rekomendasi perbaikan.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus melibatkan semua pihak, salah satunya dari institusi pendidikan tinggi. Keterlibatan perguruan tinggi dapat dilakukan oleh mahasiswa atau dosen. Dalam program pengembangan kelembagaan lembaga pengelola air bersih di Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi diawali oleh kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilanjutkan oleh dosen melalui kegiatan P2M.

Rekomendasi yang diusulkan dalam pelaksanaan program pengembangan kelembagaan pada khususnya dan program pemberdayaan pada umumnya adalah perlunya dukungan dari pihak pemerintah daerah dan pihak swasta. Selama ini pemerintah daerah belum melaksanakan pembangunan yang terkait dengan air bersih dan sanitasi, terutama di daerah perdesaan. Sedangkan pihak swasta terlibat sebagai bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun keterlibatan perguruan tinggi adalah dengan mengembangkan program KKN dan P2M melalui pembentukan jaringan antar perguruan tinggi yang memiliki program dan aktivitas yang sama terkait pemberdayaan masyarakat.

Daftar pustaka

- Dunham, Arthur. (1978). *Toward Planning for the Aging in Local Communities: An International Perspective*.
- Einsiedel, Luz. A. (1968). *Success and Failure of Some Community Development Projects in Batangas*. Paperback – Manila, Philiphine
- Gross, Bruce. Wijk, C.V. Mukherjee, Nilanjana. (2000). *Linking Sustainability with Demand, Gender and Poverty*. Belanda:International Water and Sanitation Center.
- GTZ. (2007). *Capacity Development in Water Sector*. Eschborn: GTZ.
- GTZ. (2010). *Pro Poor Financial Services for Rural Water*. Eschborn: GTZ.
- United Nations Milenium Project Task Force on Water and Sanitation. (2005). *Health, Dignity, and Development: What Will It Take?*. London: Earthscan.